

## Terdaftar Peserta BPJS, Mahmud Irsyad Lubis Harus Bayar Biaya Rawat Inap 5 Hari

A. Putra - [MEDAN.NEWSPAPER.CO.ID](http://MEDAN.NEWSPAPER.CO.ID)

Apr 2, 2022 - 10:31



MEDAN - Mahmud Irsyad Lubis, SH tak menyangka bahwa dirinya yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 1, tiba-tiba ketika hendak pulang diberikan bill biaya pengobatan rawat inap selama di RSUD Sundari selama 5 hari, terhitung mulai Minggu (27/3) hingga Kamis (31/3).

Menurut Mahmud Irsyad Lubis, dikutip M24 bahwa dirinya yang mengalami

penyakit diabetes, Minggu (27/3), terpaksa mendatangi RSUD Sundari untuk menjalani operasi pemotongan jarinya.

"Sebelum ini, saya telah 2 kali rawat inap dan operasi di RSUD Sundari ini dengan umum, namun kedatangan saya Minggu kemarin (27/3), saya telah mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan saya sebesar 8 juta dan juga membayar dendanya sekitar 4 jutaan, makannya setelah itu saya bisa dilakukan operasi dengan menggunakan BPJS ini," kata Mahmud Irsyad Lubis, SH yang juga Ketua Korp Alumni Advokat UMSU (KAUM) ini kepada awak media saat di RSUD Sundari, Jumat (1/4) sekira pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya Mahmud Irsyad Lubis langsung diinapkan di kamar kelas 1. Namun dalam beberapa jam di dalam kamar kelas 1 yang kecil itu, serta AC tak berfungsi, akhirnya Mahmud Irsyad Lubis meminta dirinya kepada pihak RSUD Sundari agar dipindahkan ke kamar VIP dan tidak mempersoalkan mengenai selisih pembayaran dari kamar kelas 1 ke kamar VIP.

"Saat itu istri saya yang sempat bertemu dengan pihak RSUD Sundari berfikir bahwa perpindahan kamar hanya akan menambah biaya kekurangannya dari kamar kelas 1 ke VIP, dan pihak RS hanya menjabarkan itu saja, seakan ada sesuatu yang ditutupi," ungkapnya.

Kemudian Mahmud Irsyad Lubis, SH yang telah selesai menjalankan operasi, akhirnya Kamis (31/3) hendak pulang ke rumah, tapi tiba-tiba dirinya yang saat itu ditemani istrinya disodorkan tagihan sebesar Rp 6,9 jutaan, dengan alasan pihak RS sebagai biaya tambahan kamar dan biaya diagnosa dokter.

"Jumlah yang besar itu dengan bahasa biaya diagnosa dokter yang membuat saya keberatan, saya inikan di klaim BPJS Kesehatan, kenapa musti mengeluarkan biaya Diagnosa dokter dengan alasan saya pindah kamar ke VIP. Saat itu saya keberatan dan saya serta istri saya tak peduli untuk meminta pulang, dan saya saat itu menyampaikan besok pada Jumat (1/4) saya akan datang ke RSUD Sundari ini lagi beserta pengacara - pengacara dari KAUM dan Wartawan. makanya hari ini saya datang beserta teman-teman semuanya, tujuan saya akan membayar biaya tambahan perpindahan kamar saja, bukan untuk biaya diagnosa yang saya anggap hal itu telah diklaim oleh BPJS, buat apa saya urus lagi BPJS saya, serta membayar juga denda, jika saya juga harus dikenakan biaya lagi seperti diagnosa," terangnya.

Bambang Santoso, SH, MH, Sekretaris Umum KAUM dan juga ikut mendampingi Mahmud Irsyad ke RSUD Sundari, Jumat (1/4) mengatakan bahwa tindakan pihak RSUD Sundari diduga telah melakukan manipulasi biaya tagihan, padahal pasien peserta BPJS Kesehatan.

"Seharusnya biaya diagnosa dokter itu kan telah diklaim ke BPJS, kenapa pasien peserta BPJS lagi yang musti dikenakan biaya, jika akibat perpindahan kamar akan menjadikan pasien ke umum, mana peraturannya? dan pihak RS seharusnya menjelaskan hal yang itu dengan detail kepada pasien dan keluarganya saat akan memalukan perpindahan kamar, jangan terkesan ada pengebakan, disaat pasien akan keluar, baru ditagih dengan biaya yang luar biasa besarnya, sampai Rp 6,9 juta, saya dan teman-teman dari KAUM beserta pasien yang kebetulan Ketua KAUM merasa keberatan dengan tagihan

diagnosa dokter itu, kami akan pulang segera karena kondisi Mahmud Irsyad seharusnya dalam istirahat untuk pemulihan, tapi dihadapi dengan hal ini, kami tunggu tagihan dari RSUD Sundari dan selanjutnya kami akan melakukan langkah hukum," pungkasnya.

Rini, bagian Administrasi RSUD Sundari yang sempat dicerca pertanyaan oleh belasan pihak pengacara KAUM dan wartawan saat diruangannya, Jumat (1/4) berdalih bahwa perpindahan kamar dari Kelas 1 ke VIP, pasien akan dikenakan biaya diagnosa dokter dan tidak diklaim oleh BPJS.

"Itu sudah peraturan RS dan BPJS," dalihnya.

Kemudian ketika wartawan dan pengacara KAUM dipertanyakan mengenai peraturannya, Rini tak bisa menjabarkan hal itu.